



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR 912/III/VI/2016

**KOMISI V PASTIKAN
TRANSPORTASI LEBARAN SIAP**

MEMBANGUN PAPUA HARUS DENGAN HATI

DPR RI SOROTI KARTEL DAGING SAPI



GRATIS
Tidak Diperjualbelikan



Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau kesiapan transportasi laut jelang lebaran di Pelabuhan Makassar

Komisi V Pastikan Transportasi Lebaran Siap

Seluruh pemangku kepentingan jasa transportasi laut termasuk penyeberangan di Sulsel telah siap. Sesuai keputusan Rapat Komisi V perlu lebih awal melakukan peninjauan untuk memastikan atas keselamatan transportasi laut supaya kalau ditemukan kendala dan hambatan bisa segera diselesaikan.

Demikian ditegaskan Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi V DPR RI Yoseph Umarhadi ketika menggelar pertemuan dengan jajaran Hubla, Syahbandar, Pelni dan BMKG terkait keselamatan transportasi laut di Makassar, Jumat (10/6).

Ditegaskan, tiga hal menandai suksesnya angkutan lebaran adalah keselamatan, kenyamanan dan keamanan. Meski masalah keamanan belum banyak disinggung, jangan sampai terkendala, sehingga saudara-saudara kita yang mau mudik bersuka cita dengan keluarga bisa selamat dan nyaman juga aman.

“Kita harapkan seluruh aparat keamanan terlibat dalam persiapan angkutan di darat maupun dalam perjalanannya, jangan sampai kehilangan, kecopetan atau perampokan termasuk terorisme, perlu diantisipasi,” ungkap politisi PDI

Perjuangan ini.

Dari penjelasan Syahbandar, Joseph menyatakan tidak ada masalah, semua kapal yang datang dan siap berlayar sudah dicek. Bagaimanapun pengecekan kembali ini suatu kegiatan rutin yang harus dilaksanakan. Bahkan lanjutnya, keselamatan transportasi tidak hanya lebaran saja tetapi juga sepanjang tahun. “Kita harap pada tahun 2016 ini tidak didengar adanya peristiwa yang tidak menggembirakan terkait keselamatan,” ujarnya.

Di sisi lain, Komisi V juga ingin agar Proyek Tol Laut sukses, sebab dana triliunan rupiah sudah dikurirkan. Baik PMN baik kepada Pelni, Jakarta Lloyd untuk pembangunan kapal sudah mencapai 4,5 T, subsidi 1, 16 T. Diantaranya PMN Pelni 500 M Jakarta Lloyd 350 M. “Kita semua mendukung karena meski terlambat, konektivitas

transportasi laut menjadi tulang punggung untuk kurangi kesenjangan antar daerah,” ia menambahkan.

Pelni memprediksi tahun ini penumpang kapal melonjak 3,4 persen atau sebanyak 718.700 penumpang. Sebanyak 23 kapal disiapkan 15 diantaranya dari Pelni dan perusahaan lain termasuk kapal perintis. Pemangku kepentingan lain seperti SAR, BMKG dan Pelindo menyatakan kesiapannya dan membuka Posko Khusus yang siap 24 jam melayani masyarakat.

Tim Kunspek Komisi V ke Sulsel selengkapnya, Joseph Umarhadi (FPDI-P), Hamka B. Kady (FPG), Andi Iwan Darmawan Aras dan Ade Rezki Pratama (F Gerindra), Umar Aرسال (FPD), Cucun Ahmad Syamsurijal (FPKB), Mahfudz Abdurrahman (FPKS), Nurhayati (FPP), Ahmad HM Ali (F Nasdem) dan Fauzih Amro (F Hanura). ■

Ketua DPR RI Motivasi Siswa SMA-SMK Se-Kota Bekasi

Ketua DPR RI, Ade Komarudin memotivasi siswa-siswi SMA-SMK se-Kota Bekasi untuk tidak pernah putus asa dalam meraih cita-cita. Hal tersebut terungkap saat melakukan kunjungan kerjanya ke Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (9/6).

“Jangan pernah malas untuk belajar ke sekolah, karena saat ini transportasi dan teknologi sudah sangat mendukung. Jangan pernah juga putus asa dan merasa kalah dengan anak-anak lain di kota Jakarta misalnya,” ungkap Akom, begitu ia biasa disapa.

Akom mengisahkan perjuangan dirinya yang dilahirkan di Kampung Benteng, Purwakarta. Saat ke sekolah yang berjarak 7,5 kilometer dari rumahnya, harus melewati pematang sawah dengan berjalan kaki, karena memang tidak ada alat transportasi. Ketika musim hujan tiba, pinggir sawah pun menjadi sangat becek. Kondisi itu pun mengharuskannya untuk menjinjing sepatunya. Siapa sangka jika kemudian anak Kampung Benteng itu kini menjadi Ketua dari lembaga tinggi negara, DPR RI.

Pada kesempatan itu, Akom yang didampingi anggota Komisi IX Jhon Kennedy Aziz dan Walikota Bekasi, Rahmat Effendi juga menerima beberapa aspirasi dari Kota Bekasi. Salah satu aspirasi yang disampaikan oleh Walikota Bekasi terkait dengan adanya UU Pemda Pasal 15 ayat 1 dan 2 yang mengalihkan



Ketua DPR RI Ade Komarudin bersama siswa-siswi SMA se-kota Bekasi

kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi. Hal ini menurutnya sebuah langkah kemunduran. Pasalnya, pendidikan sejatinya harus dikelola dari lingkup pemerintahan terdekat. Pengalihan kewenangan ke pemerintah provinsi dinilai Rahmat Effendi juga akan mempengaruhi penghasilan dan kesejahteraan guru, khususnya di Kota Bekasi yang belakangan sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPR RI, Ade Komarudin mengatakan bahwa saat ini permasalahan tersebut sedang dalam proses judicial review di MK. Pihaknya akan melihat terlebih dahulu hasil dari proses tersebut, baru kemudian akan

mendalami lebih lanjut bersama dengan komisi terkait di DPR RI.

“Tidak mungkin kita (DPR RI-red) tidak merespon apa yang terjadi dengan Kota Bekasi dan kota-kota lainnya, terlebih lagi jika merugikan atau mengurangi kesejahteraan guru. Namun kita tunggu dulu hasil dari judicial review tersebut. Jika hasilnya tidak memuaskan maka bisa diamandemen kembali undang-undang tersebut. Atau apakah nanti akan dibuat kekhususan untuk kota-kota tertentu yang dinilai sudah mandiri dalam pengelolaan pendidikannya. Jadi kita lihat saja dulu hasil judicial review nya ya,” jawab Akom di Aula Yayasan Al Muhajirien, Kota Bekasi, Jawa Barat. ■

(Ayu), Foto: Rumi/br



PENGAWAS UMUM Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH** Dr. Winantuningtyas Titi Swasanary, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH** Dra. Damayanti, M.Si, (DEPUTI PERSIDANGAN) **PIMPINAN REDAKSI** Drs. Suratna, M.Si (Kabag Media Cetak & Media Sosial) **WK. PIMPINAN REDAKSI** Dra. Tri Hastuti (Kasubag Media Cetak) Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis) Insan Abdirrohman, S.H, M.Si (Kasubag MedSos dan Website) **REDAKTUR** Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos **SEKRETARIS REDAKSI** Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto **ANGGOTA REDAKSI** Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuti, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega **REDAKTUR FOTO** Eka Hindra, Iwan Armanias **FOTOGRAFER** Rizka Arianindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Andi M. Iham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah **ADMINISTRASI FOTO** Hasri Mentari **ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA** Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Soebroto-senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail dpr.pemberitaan@gmail.com www.dpr.go.id/berita

PIMPINAN PENERBITAN Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan) **WK. PIMPINAN PENERBITAN** Mediantoro, SE (Kasubag Produksi), Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si (Kasubag Distribusi) **STAFF PRODUKSI** Eko Murdiyanto, Barliansyah **SIRKULASI** Abdul Kahfi, S.Kom, Siti Rondiyah, Oji **Telp.** 021-571 5697 **Fax.** 021-571 5421 **Email** penerbitandpr@gmail.com

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

Ketua DPR RI Bantu Percepatan Pembangunan FK Untirta



Ketua DPR RI Ade Komarudin dalam acara Dialog Ramadhan di UNTIRTA

Ketua DPR RI Ade Komarudin akan mengupayakan semaksimal mungkin membantu proses percepatan pembangunan Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA).

Sebagai universitas yang baru menjadi negeri, semua pihak perlu berupaya keras agar pengembangannya menjadi lebih cepat.

"Ketika berdiskusi dengan Rektor UNTIRTA, saya diberitahu bahwa kampus ini berkeinginan mendirikan Fakultas Kedokteran, tentu menjadi kewajiban saya membantu agar perkembangan UNTIRTA lebih cepat seperti yang diharapkan" kata Ade Komarudin dihadapan ratusan mahasiswa dalam acara Diskusi Kebangsaan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Sabtu (11/6).

Akom berharap, semua pihak untuk ikut membantu hal-hal yang dibutuhkan dalam pembangunannya. Karena tidak

mungkin membangun Fakultas Kedokteran tetapi tidak ada Rumah Sakit, lalu untuk perizinan dari Kemendiknas juga diperlukan.

Ia juga mengharapkan, terutama kepada seluruh media agar mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa Banten sudah memiliki universitas yang cukup terpercaya di bidang pendidikan. Sehingga masyarakat Banten tidak perlu jauh-jauh kuliah.

Selain itu, pesan Akom kepada para mahasiswa, "kita harus bermimpi besar, seperti apa yang dikatakan oleh Soekarno. Sejak kecil saya sudah bercita-cita menjadi politisi, berkat kerja keras, memiliki mentalitas pemenang, dan fokus pada tujuan utama, alhamdulillah berhasil menjadi politisi, bahkan saya

menjadi Ketua DPR RI" kata Politisi F-Golkar itu.

Ia menambahkan, kesuksesan bermula dari pikiran, yaitu dengan cara menanamkan kata "walaupun" dan membuang jauh kata "tetapi". Akom mencontohkan, "walaupun saya orang desa, saya harus bisa menjadi Ketua DPR RI, jangan ditambah menggunakan kata tetapi" tutupnya.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor UNTIRTA Soleh Hidayat mengatakan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa telah mendapatkan anggaran dari IDB sebesar 600 Milyar dan kampus tersebut memiliki tanah yang luasnya mencapai 100 hektar.

"Alhamdulillah dengan kedatangan orang nomor satu di DPR RI, semakin menambah keberkahan kepada kampus kami dalam mewujudkan percepatan pembangunan Fakultas Kedokteran nantinya. Saya juga mengapresiasi sikap Pak Ade Komarudin yang langsung merespon akan membantu kami" tuturnya. ■

Ketua DPR RI Gelar Acara Buka Puasa Bersama KAHMI

Ketua DPR RI Ade Komarudin mengadakan acara buka puasa bersama dengan pengurus dan anggota Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), HMI, Alumni SMA, FPG, SOKSI dan Organisasi Masyarakat lainnya, yang dilaksanakan di Rumah Dinas Ketua DPR RI di Komplek Perumahan Widya Chandra, Jakarta Selatan.

“Saya menjalankan amanah dari pengurus KAHMI untuk menjadi tuan rumah acara buka puasa bersama, yang memang selalu rutin dilakukan selama ini. Sebelumnya bertempat di Kediaman Bang Akbar Tanjung, sekarang di rumah saya, dan berikutnya ditempat teman-teman HMI yang lain,” ujar Ade Komarudin di sela-sela acara tersebut, Senin (13/6).

Diakuinya, memang acara ini rutin dilakukan secara simultan setiap tahun saat bulan Ramadhan. KAHMI kata Akom, punya agenda buka puasa bersama dikalangan alumninya.

Seusai buka bersama dan solat maghrib, dilanjutkan sholat Isya dan Tarawih, dan

diisi dengan beberapa sambutan dari para tokoh yang hadir. Pada kesempatan pertama disampaikan oleh Reni Marlinawati, yang juga Ketua FPP dan anggota Komisi X DPR RI. Selanjutnya tuan rumah Ade Komarudin menyampaikan sambutan, dan terakhir disampaikan oleh Mantan Ketua DPR RI sekaligus Politisi senior Akbar Tanjung. Selesai pemberian sambutan, acara dilanjutkan dengan mendengarkan ceramah siraman rohani bagi para undangan yang hadir.

Dalam sambutannya, Akom, panggilan akrab Ade Komarudin, menyampaikan rasa syukurnya karena telah dapat menjalankan tugas dari KAHMI untuk

menjadi tuan rumah pada acara buka puasa bersama itu.

“Mudah-mudahan tradisi acara kegiatan rutin tahunan ini bisa terus dilakukan oleh generasi selanjutnya. Dan semoga dengan acara silaturahmi kita bisa terus berlanjut, karena dengan acara kumpul seperti inilah HMI menjadi organisasi yang disegani,” ucap Akom.

Hadir dalam acara ini antara lain tokoh-tokoh politik mantan Ketua MK dan Ketua Presidium KAHMI Mahfud MD, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, dan Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriadi Azhari. ■

(dep.mip), Foto: Rumi/br



Ketua DPR RI Ade Komarudin mendengarkan sambutan dari Anggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati dalam acara buka puasa bersama KAHMI



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyerabkan palu sidang kepada Hasrul Azwar yang telah dilantik menjadi Wakil Ketua BURT

Hasrul Azwar Gantikan Dimiyati Natakusumah Jadi Wakil Ketua BURT

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memimpin Rapat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dengan agenda penetapan Pimpinan BURT dari FPP, Rabu (15/6). Dalam rapat tersebut hadir anggota dari 7 fraksi dari keseluruhan 10 fraksi sehingga dinyatakan sah dan memenuhi korum.

Fahri Hamzah yang didampingi Ketua BURT Rum Kono dan Wakil Ketua Agung Budi Santoso menyebutkan, penetapan Pimpinan BURT dari FPP dilakukan menyusul surat dari FPP tanggal 6 Juni perihal pergantian Wakil Ketua BURT semula dijabat oleh Dimiyati Natakusumah, digantikan oleh Hasrul Azwar.

“Apakah usulan dari FPP ini disetujui? tanya Fahri yang dijawab “Setuju” oleh peserta rapat BURT. Sesuai penetapan

tersebut, Wakil Ketua DPR RI menyerahkan palu Pimpinan Rapat kepada Hasrul Azwar yang didampingi Ketua BURT Rum Kono dan Agung Budi Santoso.

Ketika diminta tanggapannya setelah menjadi Pimpinan baru BURT Hasrul Azwar mengatakan, BURT sebagai salah satu AKD terdepan dalam menjaga, mengawasi dan meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan para anggota DPR RI baik di kantor, di tempat tinggal maupun di tempat-tempat rapat

lainnya. Fungsi BURT ini sangat penting dalam pengawasan ke dalam sehingga diperlukan terobosan baru misalnya keamanan orang-orang yang datang ke gedung wakil rakyat ini.

Juga fasilitas lain seperti perpustakaan atau tempat menampung masyarakat pengunjung rasa atau penambahan fasilitas lain. “Masih banyak PR yang harus dilakukan BURT,” ujarnya.

Terkait pemotongan anggaran di kementerian dan lembaga, Hasrul menyatakan itu biasa sebab kondisi ekonomi kita seperti itu. “Kita memaklumi adanya pemotongan anggaran tetapi tidak mempengaruhi kinerja DPR RI tetap melaksanakan tugas konstitusionalnya,” ia menambahkan. ■

(mp), foto : arief/hr.

Membangun Papua Harus Dengan Hati



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon bersama para pemateri dalam acara FGD Otsus Papua, Yogyakarta dan Aceh

Rakyat Papua membutuhkan perhatian khusus. Dan perhatian itu adalah dengan merebut hati orang Papua. Para pejabat dan tokoh politik diimbau datang ke Papua dengan hati. Dana otonomi khusus (Otsus) bukanlah segalanya untuk mensejahterakan rakyat Papua. Tapi, bila hati yang bicara, rakyat Papua merasa senang dan perlahan bisa sejahtera.

Demikian mengemuka dalam diskusi Focus Group Discussion (FGD) yang membincang Otsus di tiga daerah khusus, yaitu Aceh, Papua, dan DI Yogyakarta di DPR RI, Senin (13/6). Acara yang dimoderatori Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon itu, menghadirkan tiga pem-

bicara, yaitu Thaha Alhamid, Jimmy De-meanusi Ijie, dan Tito Karnavian. Ketiganya membincang Papua dari perspektif masing-masing.

Thaha yang mantan aktivis Gerakan Separatis Papua bidang politik mengemukakan, banyak dana dikirim ke Papua, tapi faktanya rakyat Papua tetap saja tak kunjung sejahtera. Terbentuknya Otsus ini, lanjut Thaha, lantaran ada hati rakyat Papua yang terluka. Bukan lantaran kekurangan anggaran. Soal anggaran, Papua punya kekayaan alam yang luar biasa dan itu bisa jadi sumber dana tersendiri. "Jadi, datanglah ke Papua dengan hati bukan dengan uang," tegasnya.

Ironis, sambung Thaha, dana Otsus yang mengalir ke Papua tak membawa dampak apa-apa. Dana yang besar itu kemungkinan diselewengkan oleh oknum pejabat Pemda setempat. Thaha lalu mengusulkan agar dana Otsus dialokasikan untuk membangun kantor pusat Otsus

saja. Di kantor itu harus tertulis dana Otsus yang diterima dan yang sudah disalurkan. Dengan begitu rakyat Papua tahu, ke mana saja dana tersebut mengalir.

"Bila rakyat Papua sejahtera, tak mungkin ada suara ingin merdeka," ujarnya dalam diskusi yang dihadiri Tim Pemantau Otsus DPR RI ini. Tito Karnavian mantan Kapolda Papua mengakui, masalah kesejahteraan masih jadi isu serius di Papua. Ada perbedaan mencolok antara masyarakat pegunungan dan pantai.

Bila masyarakat pantai sudah menjadi masyarakat berkomunikasi dengan kemajuan teknologi, maka di pegunungan masih terbelakang dan jumlahnya justru dominan. Untuk mensejahterakan dan membangun fasilitas publik bagi masyarakat pegunungan selalu terhadang topografi yang sulit dan berat. Belum lagi soal peradaban yang juga masih jadi gap yang mencolok. Ini harus dipahami pemerintah dan DPR RI yang telah membentuk Otsus. ■

Presiden Ajukan Tito Karnavian Calon Tunggal Kapolri

Ketua DPR RI Ade Komarudin mengatakan, hari ini (Rabu 15/6) menerima surat dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Isi surat tersebut terkait dengan pergantian calon Kapolri baru.

Dalam surat itu, Presiden Jokowi telah mengajukan nama Komjen Pol Tito Karnavian menjadi calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Badrodin Haiti.

“Beliau (Pratikno) menyampaikan surat secara tertutup, amplop tertutup. Saya buka isinya adalah Presiden RI mengajukan pengganti Bapak Badrodin Haiti yang segera akan memasuki masa pensiun,” kata Ade menjelaskan kepada



Ketua DPR RI Ade Komarudin

wartawan disela-sela kunjungannya ke Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen.

Ketua DPR RI yang akrab dipanggil Akom ini menambahkan, DPR RI akan segera memproses surat tersebut dan melakukan Rapat Pimpinan (Rapim) dan menyampaikan perihal pencalonan Komisaris Jendral Tito yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“DPR RI akan segera memproses hal ini, Insya Allah besok kita akan Rapim dan menyampaikan pencalonan Komjen Tito, dan selanjutnya diserahkan Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI, kemudian hasilnya disampaikan ke Rapat Paripurna,” papar Akom.

Politisi partai Golkar ini mengatakan, sudah melakukan komunikasi dengan Ketua Komisi III DPR RI dan mereka akan menunggu keputusan Bamus.

“Saya sudah berkomunikasi dengan Ketua Komisi III, mereka menunggu hasil keputusan Bamus,” jelas Akom. ■

(rnm), Foto: Kresno/br

Komisi V Tekankan Pentingnya Koordinasi dan Pengawasan Angkutan Lebaran

Anggota Komisi V DPR RI Fauzih Amro menekankan perlunya koordinasi dan pengawasan dalam menangani angkutan lebaran tahun 2016 ini. Sebab kebiasaan kita, bila terjadi bencana baru dilakukan dievaluasi.

“Karena itu menurut saya UU sudah ada, Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) sudah ada, tinggal pengawasan dan kedisiplinan

supaya arus mudik dan balik ini berjalan maksimal,” ungkapnya di sela-sela pertemuan dengan jajaran Ditjen Hubla, Pelindo IV, Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Makassar, PT Pelni, BMKG dan SAR, Jumat (10/6) lalu di Pelabuhan Utama Makassar Sulsel. Tim Komisi V juga berkesempatan melakukan pengecekan ke dalam kapal “ Bukit Siguntang” yang dipersiapkan angkutan lebaran di Indonesia Timur.

Dari penjelasan operator maupun regulator tidak ada problem baik Kementerian Perhubungan, Pelni maupun BMKG dan Basarnas. Karena itu menurut

politisi Hanura ini, titik tekannya pada koordinasi dan pengawasan. Karena selama ini kecelakaan terjadi karena ketidakdisiplinan, keteledoran dan kelalaian masing-masing bandara dan pelabuhan.

“Kami Komisi V melakukan fungsi pengawasan. Sebelum ada kejadian atau terjadi bencana, mohon koordinasi antara operator dan regulator dimaksimalkan plus pengawasannya,” ujarnya mengingatkan.

Jangan sampai laporannya bagus, namun kenyataannya tidak bagus. Menurut Fauzih Amro, kehadiran Tim Kunspek Komisi V ini untuk memastikan

GOPAC Resmi Buka Kantor Satelit di Jakarta

GOPAC (Global Organization of Parliamentarians against Corruption) yang merupakan organisasi global antar-parlemen yang fokus pada isu-isu korupsi secara resmi membuka kantor satelitnya di Jakarta, tepatnya di Lantai II Gedung Nusantara III, Kompleks DPR RI, Senayan Jakarta. Sehingga terhitung sejak Mei 2016, sekretariat yang selanjutnya disebut 'GOPAC Jakarta Office' ini efektif beroperasi menggantikan sekretariat global yang berpusat di Ottawa, Kanada.



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon bersama sekretariat BKSAP dan GOPAC

Ketua GOPAC yang juga Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan bahwa pendirian GOPAC Jakarta Office ini untuk membantu operasional harian sekretar-

iat global di Ottawa-Kanada menyusul berkurangnya dukungan finansial yang dimiliki organisasi tersebut. "GOPAC Jakarta Office juga menjadi kantor pendukung bagi kegiatan dan kesekretariatan



Anggota Komisi V DPR RI Fauzib Amro

H-10 dan H+ 10 nanti, atau transportasi lebaran bisa berjalan baik.

Anggota Tim Kunspek Cucun Ahmad Syasurijal juga menekankan perlunya pengecekan armada atau kapal laut dengan standar pengecekan yang jelas. Ia mempertanyakan, dengan teknologi canggih apa sudah dipasang GPS sehingga navigasinya terus berjalan tahu di mana posisi kapal. "Saya sarankan semua kapal pakai GPS sehingga bisa diketahui posisi dan segera melakukan pertolongan," ujarnya.

Sedangkan anggota Tim Hamka B. Kadi menambahkan, perlunya dalam mengendalikan system, untuk menambah sisi pengawasan dan pengendalian transportasi lebaran ini. "Pengendalian itu menentukan system berhasil atau tidak. Karena itu pengawasan dan pengendalian perlu ditingkatkan," katanya. ■

(mp), Foto: Mastur/br

chapter nasional GOPAC Indonesia," tuturnya dalam releasenya yang diterima Parlemen Selasa (14/6).

Sebagaimana diketahui, GOPAC didirikan pada Oktober 2002 sebagai salah satu resolusi dari Konferensi Parlemen Global di Ottawa. Keterlibatan Indonesia dalam jaringan kerja sama global ini tercatat sejak 2012, hingga akhirnya membentuk chapter nasional GOPAC Indonesia yang juga memegang peran penting dalam jaringan serupa di wilayah Asia Tenggara.

Pada Oktober 2015, GOPAC menyelenggarakan Konferensi Internasional Anti-Korupsi di Yogyakarta. Selain melahirkan "Deklarasi Yogyakarta" sebagai bentuk komitmen GOPAC dalam pemberantasan korupsi transnasional, perhelatan dwi-tahunan tersebut juga secara resmi memilih Fadli Zon sebagai Ketua GOPAC periode 2015-2017. Sejak itulah, Indonesia pun semakin aktif dan memegang peran penting dalam kerja sama global ini, termasuk melakukan advokasi isu anti-korupsi dan menggelar beragam upaya penguatan kapasitas bagi anggota parlemen.

Komitmen DPR RI dalam kolaborasi global untuk memerangi korupsi ditunjukkan dengan kesediaan menjadi markas kantor satelit GOPAC dengan penyediaan fasilitas ruangan sarana dan prasarana, termasuk perekrutan pegawai untuk terus melaksanakan dan mengembangkan berbagai program GOPAC, baik yang tengah berlangsung maupun yang akan datang.

GOPAC Jakarta Office ini bertanggung jawab menaungi 5 gugus regional (Asia Tenggara, Amerika Latin, Arab, Afrika dan Oceania), mendukung kegiatan komunikasi eksternal, mengembangkan proses keanggotaan baik global maupun nasional, serta mendorong kerja sama strategis dengan berbagai pihak.

Hingga saat ini anggota GOPAC Indonesia telah mencapai 54 orang, namun dalam waktu dekat chapter nasional GOPAC Indonesia juga akan segera memperbarui keanggotaannya, sekaligus menyelenggarakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan fungsi parlemen dalam perlawanan terhadap korupsi. ■

(hs,mp) Foto: Hamdis_dok.BKSAP/br

Sidak Persiapan Mudik Di Stasiun, Ketua DPR RI: Kereta Api Pilihan Transportasi Terbaik



Ketua DPR RI Ade Komarudin didampingi Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto melepas keberangkatan kereta

Menjelang lebaran dan mudik 2016, Ketua DPR RI Ade Komarudin didampingi Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengunjungi Stasiun Senen dan Stasiun Gambir, Jakarta, Rabu (15/06)

“Ini kita harus mengecek persiapan mudik agar lancar, jangan sampai kalau sudah muncul persoalan baru kita pantau,” ujar Ade Komarudin di sela-sela kunjungannya.

Dalam kunjungannya di Stasiun Gambir, pria yang akrab disapa Akom ini meninjau mesin e-ticketing, toilet yang tengah direnovasi, tempat peristirahatan sementara (transit), kemudian fasilitas lain seperti laundry dan kasir pengecekan tiket.

“Kesimpulannya, PT KAI sudah menunjukkan pelayanan yang luar biasa kepada rakyat Indonesia. Ini adalah salah satu pilihan transportasi publik yang bagus,” ujar Akom, usai meninjau Stasiun Gambir yang juga didampingi Direktur Utama PT KAI, Edi Sukmoro.

Perjalanan sidak dilanjutkan ke Stasiun Senen. Edi Sukmoro memaparkan, saat ini Stasiun Senen dapat menampung sebanyak 32.000 penumpang dan memiliki banyak kereta ekonomi.

“Disini banyak sekali kereta ekonominya. Namun, ini tidak seperti kereta ekonomi dulu yang panas, kumuh, jorok,

bau dan berdesakkan. Sekarang semua berbalik 180 derajat menjadi nyaman, bersih dan memiliki toilet yang wangi serta memiliki AC,” ujar Akom.

Sehingga, politisi F-PG itu menyimpulkan, kereta menjadi pilihan terbaik yang sangat layak untuk dipilih masyarakat.

“Namun, ketika PT KAI bekerja dengan sangat baik dan rakyat berbondong-bondong menggunakan KA, maka muncul persoalan susahnya mendapatkan tiket,” analisa politisi asal dapil Jawa Barat

itu, usai meninjau Stasiun Senen, Jakarta.

Akom menyebut, hal tersebut merupakan hukum pasar, dimana ketika masyarakat berebut mendapatkan pilihan terbaik maka akan timbul kesulitan mendapatkan pilihan tersebut.

“Untuk mengatasi hal tersebut, menjelang lebaran PT KAI telah berkomitmen untuk menambah gerbong agar dapat mengangkut seluruh pemudik ke daerah masing-masing,” ujarnya.

Dalam jangka panjang, lanjutnya, pengembangan PT KAI dilakukan dengan mendorong pemerintah memberikan PMN terkait penambahan gerbong sebanyak Rp 2 triliun.

Selain itu, dalam mudik tahun ini, PT KAI juga memberikan mudik motor gratis bagi 15.000 pemotor yang naik KA, dimana tahun sebelumnya hanya memberikan 3.000 pemotor. “Sejauh ini yang sudah mendaftar sebanyak 11.000 pemudik,” ujar Edi.

Hadir pula dalam kunjungan ini, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin Muhammad Said, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti, dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana. ■

(tt) Foto: Kresno/hr

Setjen DPR RI Upayakan Honorarium ke 13 Bagi Tenaga Ahli



Suasana rapat Setjen DPR RI dengan Perwakilan Tenaga Ahli

Baleg Minta Kinerja MenPAN-RB Dievaluasi

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk mengevaluasi kinerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini dikarenakan Menteri PAN RB sudah dua kali tidak memenuhi undangan Badan Legislasi tanpa keterangan terkait pembentukan lembaga pangan yang diamanatkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tetapi belum dilaksanakan.

“Seluruh anggota Badan Legislasi yang hadir sepakat membuat keputusan agar saudara Menteri MenPAN RB diberikan surat peringatan ketidakhadiran ini, dan hari ini juga dilaporkan kepada Pimpinan DPR RI untuk diteruskan kepada Presiden,” tegas Wakil Ketua Baleg DPR RI Totok Daryanto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/06).

Dikemukakan Totok, jika MenPAN RB menghadiri undangan rapat maka

Deputi Administrasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Achmad Djuned mengatakan Setjen DPR RI tengah mengupayakan pemberian Honorarium ke 13 bagi tenaga ahli yang bekerja di DPR RI. Hal itu disampaikan ketika melakukan pertemuan dengan perwakilan tenaga ahli dan staf administrasi Anggota DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta pada Jumat, (10/6).

“Hal itu memang sudah dianggarkan di tahun 2015 melalui usulan anggaran belanja tahun 2014, namun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang dapat menerima honorarium ke 13 itu adalah PNS, TNI/Polri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunja

persoalan bangsa berkaitan dengan stabilitas pangan dapat didiskusikan bersama untuk mencapai solusi yang terbaik. Terutama terkait dengan pembentukan lembaga yang mempunyai otoritas untuk mengkoordinasikan, mengatur dan mengarahkan kementerian dalam berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pangan sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 18 Tahun 2012.

“UU Pangan mengamanatkan bahwa dalam waktu 3 tahun itu sudah harus dibentuk suatu lembaga pangan. UU nya tahun 2012 sekarang ini sudah lebih dari 3 tahun, namun belum terlaksana. Kita perlu mendapatkan keterangan dari Menpan mengapa itu kok tidak bisa dibentuk apakah ada alasan yang bisa diterima, ataukah ada langkah yang lebih efektif dari pemerintah sehingga tidak perlu melaksanakan UU itu,” jelas politisi PAN itu.

Menurut Politisi asal dapil Jawa Timur V ini, dengan adanya pembent

ngan,” ujar Djuned.

Sebagaimana diketahui, status tenaga ahli di lingkungan Setjen DPR RI adalah sebagai Pegawai Pemerintah non-PNS, lanjut Djuned yang didampingi Deputi Persidangan Damayanti.

Meskipun begitu, pada tahun 2016 Setjen DPR RI sudah menganggarkan kembali honorarium ke 13 bagi tenaga ahli dengan dasar hukum Peraturan DPR RI Nomor 3 tahun 2014 tentang Pengelolaan tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI Pasal 42 point (1) huruf e.

Oleh karena itu, pada 2 Juni 2016, Setjen DPR RI mengirim surat dengan nomor SJ/09207/SETJEN-DPR-RI/PK.01/06/2016 perihal usulan honorarium ke 13 bagi tenaga ahli dan staf administrasi kepada Menteri Keuangan.

Namun, sampai saat ini Surat Setjen DPR RI tersebut belum mendapatkan balasan dari Menteri Keuangan. ■



Wakil Ketua Baleg DPR RI Totok Daryanto

tukan lembaga pangan tersebut bisa menjadi jawaban atas permasalahan pangan yang selalu dialami bangsa setiap tahunnya khususnya menjelang hari raya besar keagamaan seperti stabilitas pangan dan harga yang tak terkendali.

“Isu pangan sangat mendesak untuk dibahas karena ada kenaikan harga pangan dan juga ada masalah yang terkait dengan persiapan lebaran. Ini ada hubungannya dengan UU Pangan dan setidaknya pemerintah memiliki instrument yang kuat jika ingin melaksanakan UU Pangan yang sudah ditetapkan bersama-sama,” kritisinya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo, persoalan pangan menjadi persoalan yang sangat serius karena menyangkut masalah harkat hidup orang banyak. Dikatakannya, sandang, pangan dan papan merupakan amanat konstitusi yang dijamin oleh negara.

“Pemerintah seharusnya membentuk lembaga otoritas pangan, namun kenapa sampai hari ini kementerian terkait sebagai pembantu Presiden mengabaikan hal itu. Padahal sesuai instruksi Presiden dalam rapat kordinasi terbatas agar keterjangkauan pangan dan kualitas pangan tetap terjaga, jangan sampai kekurangan pasokan pangan,” ungkap Firman.

Disamping itu, Firman menambahkan, pentingnya pembentukan lembaga otoritas pangan tersebut adalah sebagai *buffer stock* dan penyangga harga sehingga para pelaku pasar tidak memiliki ruang untuk mengendalikan harga.

“UU ini bisa menjawab tantangan terhadap masalah karut marutnya pangan nasional kita, tetapi justru Menteri yang punya otoritas tidak hadir. Sesuai dengan mekanisme 3 kali berturut-turut tidak hadir tanpa keterangan maka bisa dipanggil paksa, tetapi sebelum yang ke 3 ini, Baleg bersepakat menulis surat kepada pimpinan DPR RI untuk mempertanyakan keseriusan MenPAN RB terkait pembahasan uu ini,” tambahnya. ■

Banggar DPR RI Setujui Rencana Kerja Anggaran pada Tiga Menko

Badan Anggaran DPR RI menyetujui rencana kerja anggaran Menko Bidang Perekonomian, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Menko Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya dalam RAPBN-P 2016.



Suasana Rapat Banggar DPR RI dengan tiga Menko terkait RAPBN-P 2016

Rapat ini dipimpin oleh Ketua Banggar Kahar Muzakir, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (13/6).

“Karena bapak-bapak di depan sudah mengajukan angka, dan tadi tidak ada yang keberatan. Apa bisa kita sahkan?” tanya Kahar kepada para legislator Banggar. Menanggapi pertanyaan itu para anggota Banggar menjawab dengan kata “setuju,” seketika palu sidang pun diketok oleh Ketua Sidang Kahar Muzakir, sebagai pertanda pengesahan rencana kerja anggaran tiga menko.

Sebelumnya tiga menko, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, dan Menko Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli telah memaparkan penjelasan tentang RKA-KL setiap kementerian koordinator. Rapat berjalan cukup efektif, tidak ada perdebatan di luar tema anggaran.

Tiga menko tersebut mengucapkan terimakasih dan apresiasinya kepada para Anggota Banggar yang telah kooperatif menyetujui rencana kerja anggaran yang telah diajukan, bahkan Menko Bidang

Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan rapat ini tepat dan efektif, “Terimakasih atas kepercayaan Bapak,” ungkap Rizal.

Sebelumnya dipaparkan, perubahan Pagu DIPA 2016 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan total Pagu Anggaran setelah APBN-P 2016 Rp. 359.213.389. Sedangkan anggaran dan program di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebesar 487,3 M. Dan Pagu Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya dengan total Rp. 500 M. ■

(foto) Foto: Andri/br

Pemerintah Disarankan Ciptakan Kantong Pangan Nasional di Setiap Daerah



Anggota Komisi VI DPR RI Aria Bima

Guna mewujudkan cita-cita kedaulatan pangan nasional pemerintah disarankan untuk menciptakan kantong-kantong pangan nasional. Menurut Anggota Komisi VI DPR RI Aria Bima, kantong pangan nasional di setiap daerah startegis bisa mengintegrasikan *supply and demand* pangan nasional.

“Maka pemerintahan Jokowi ini kalau akan melakukan target kedaulatan pangan, harus benar-benar mengintegrasikan *supply and demand* dalam konteks wilayah nasional. Dan membuat kantong-kantong pangan di setiap wilayah yang menjadi lumbung pangan di masing-masing daerah. Wilayah timur mana, wilayah tengah mana, wilayah barat, harus dibagi-bagi lagi. Itu yang saya kira mengenai capaian kedaulatan pangan dan harus terukur,” papar Aria tidak lama ini.

Untuk mengintegrasikan ketersediaan dan kebutuhan pangan nasional, Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini menekankan kepada setiap kementerian yang berwenang untuk melakukan koordinasi secara kompak dan sinergis. Aria menilai koordinasi pada setiap pemangku kepentingan masih belum optimal.

“Yang penting itu koordinasi, Bulog itu kerjanya *ngapain* dalam konsep swasembada pangan. Kan masuk lima program prioritas pemerintah, termasuk

swasembada pangan. Perdagangan *ngapain*, perindustrian *ngapain*, pertanian *ngapain*, jadi jidatnya masing-masing Dirut itu harus ada mereknya. Harus *ngapain* poinnya. Saya melihat koordinasinya masih kurang,” tandas Aria.

Dewan dari daerah pemilihan Jawa Tengah V ini juga menyinggung soal pemberdayaan lahan kering dan lahan basah. Menurutnya di setiap kondisi lahan memiliki potensi masing-masing, hal demikianlah yang harus dimanfaatkan secara jeli oleh pemerintah.

Aria juga mempertanyakan, apakah saat ini pemerintah telah memaksimalkan penyerapan pangan lewat Bulog. Apakah kemudian ada hal-hal yang perlu dialokasikan untuk para BUMN pangan nasional, seperti pupuk dan lain-lainnya. Mengenai hal tersebut dia memungkinkannya untuk melakukan audit di dalam tubuh Bulog. “Hari ini kebutuhan pangan beras di tingkat petani posisinya agak kacau,” keluh Aria. ■

(foto) Foto: Jaka/br

Baleg Sahkan Perubahan Tatib Kunjungan Kerja

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menetapkan perubahan kedua Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Terdapat dua perubahan yakni, pelaksanaan kunjungan kerja perorangan yang boleh dilakukan diluar masa reses dan terkait usulan Rancangan Undang-Undang inisiatif anggota yang boleh dibahas di Baleg.

“Kali ini kita ubah kunjungan kerja boleh dilakukan diluar masa reses, jadi di masa persidangan boleh dilakukan,” kata Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas saat memimpin Rapat Pleno Baleg di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (13/06).

Berdasarkan tata tertib sebelumnya, Supratman menjelaskan, kunjungan kerja perseorangan hanya boleh dilakukan pada masa reses. Namun, setelah perubahan kedua tatib DPR RI, setiap anggota diperbolehkan melakukan kunjungan kerja untuk menemui konstituennya



Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menerima dokumen pandangan fraksi PDIP diwakili Jalaludin Rakhmat

pada masa persidangan. Mengingat panjangnya masa persidangan akibat dari pengurangan masa reses.

“Perubahan ini dilakukan karena melihat masa persidangan kita yang cukup lama sementara setiap anggota wajib untuk berkunjung ke daerah pemilihan masing-masing,” jelas politisi Fraksi Gerindra itu.

Sementara itu, terkait dengan anggaran kunjungan kerja, Supratman menegaskan tidak ada perubahan anggaran. Ditegaskannya, anggaran

kunjungan kerja terpisah dengan anggaran reses anggota dewan sehingga anggaran kunjungan kerja di luar masa reses akan tetap sama dengan kunjungan kerja saat reses.

“Tidak ada yang berubah soal anggaran, ini hanya soal perubahan waktu kunjungan kerja saja,” jelasnya.

Perubahan Kedua Tata Tertib DPR RI tentang Kunjungan Kerja ini disetujui oleh seluruh Fraksi dengan menyerahkan pandangan mini fraksinya kepada pimpinan rapat secara tertulis. ■

(amb, mp), Foto: jayadi/br

Otoritas Pelabuhan Semarang Harus Sigap Antisipasi Kecelakaan

Kecelakaan kapal laut masih cukup tinggi di teluk Balikpapan, Kalimantan Timur. Otoritas Pelabuhan diminta agar sigap mengantisipasi kecelakaan laut, apalagi jelang arus mudik yang penumpangnya kian melonjak tajam.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana menyampaikan hal tersebut saat meninjau kesiapan arus mudik di Pelabuhan Semarang, Balikpapan, Jumat (10/6). “Transportasi laut termasuk tinggi angka kecelakaannya. Untuk itu, Komisi V mengunjungi pelabu-

han-pelabuhan, bagaimana mitigasi mengurangi kecelakaan laut. Kami meminta stakeholder melakukan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, termasuk antisipasi kecelakaan yang sering terjadi di Teluk Balikpapan.

Saat Komisi V berkunjung ke pelabuhan, memang, sudah ada pembenahan yang dilakukan oleh otoritas pelabuhan. Terminal penumpang lebih rapi, areal parkir lebih tertib, dan penjualan tiket dijual melalui sistem online dengan

menggunakan *boarding pass*. Yudi menilai, apa yang dilakukan oleh otoritas dan operator pelabuhan merupakan pelaksanaan SOP yang standar. “Itu pelayanan *extraordinary* daripada hari-hari biasa.”

Anggota F-PKS DPR RI itu menyerukan, yang paling penting, jangan sampai terjadi kecelakaan laut kembali di teluk Balikpapan. Dia memahami ada lonjakan penumpang setiap kali arus mudik terjadi. Syahbandar harus mengecek berapa armada yang layak jalan. “Tidak boleh penumpangnya melebihi kapasitas kapal yang ada,” ujarnya lebih lanjut. ■



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana

(amb), Foto: M. Husen/br

Arsitek Jadi Tangan Negara Benahi Pembangunan

Profesi arsitek jadi kebutuhan mendesak bagi negara dalam mengelola pembangunan fisik. Para arsitek jadi tangan negara untuk membenahi kesemrautan pembangunan. Banyak PR pembangunan yang harus diselesaikan dan Komisi V menjawabnya dengan inisiasi RUU Arsitek.



Anggota Panja RUU Arsitek Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo dalam diskusi forum legislasi

Anggota Panja RUU Arsitek Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengemukakan hal tersebut dalam diskusi Forum Legislasi di Media Center DPR RI, Selasa (14/6). Hadir pula sebagai pembicara Adjar Prayudi Direktur Bina Penataan Bangunan, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR, dan Ashadi pengamat dari Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Menurut Sigit, kelak persoalan IMB juga bisa diserahkan kepada seorang arsitek. Para arsiteklah yang mengawasi IMB dengan profesional. Untuk itu, dibutuhkan sertifikasi bagi para arsitek yang bisa diakui negara, bahkan internasional. Dan RUU ini kelak akan mengatur semua persoalan krusial tersebut. Dalam setahun diupayakan RUU ini rampung.

“Arsitek jadi leader semua kegiatan konstruksi, mulai dari perencanaan, desai, hingga amdal,” jelas politisi PKS ini. RUU ini, lanjut Sigit, akan melindungi

masyarakat pengguna jasa konstruksi. Yang jelas, RUU ini mengatur tata berarsitek dengan baik. Pada bagian lain, Sigit juga mengungkapkan,

jenjang pendidikan arsitek kini tak bisa lagi ditempuh selama empat tahun. Pendidikan arsitek harus ditempuh lima tahun.

Dunia internasional, lanjut politisi dari dapil Jatim I itu, hanya mengukui pendidikan arsitek yang ditempuh lima tahun. Ini sudah berdasarkan empiris di berbagai negara. “Arsitektur merupakan ilmu terapan. Jadi tidak ada yang lulus dalam dua tahun saja,” katanya. Ditambahkan oleh Ashadi perlu penambahan durasi satu tahun lagi dari biasanya hanya empat tahun kuliah. Setahun lagi diisi dengan pendidikan profesi arsitek. Ini penting untuk mendapat pengakuan dunia internasional.

Sementara itu Adjari mengatakan, banyak kementerian yang kelak terlibat dalam penyusunan RUU ini. Selain Kementerian PUPR, ada Kementerian Ristek Dikti, Kemenkum HAM, dan Kemensesneg. Dia berharap, kelak bila sudah diundangkan, banyak arsitek nasional yang bisa berkibrah di luar negeri. Untuk itu, sertifikat kompetensi arsitek perlu diadakan. Jadi, kelak yang disebut arsitek adalah mereka yang telah bersertifikasi. ■

(mb), Foto: Rizka/br

Penghematan Anggaran Kementan Harus Untuk Penguatan Kesejahteraan Petani

Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, yang membahas tentang RKA-KL dan RKP K/L Tahun Anggaran 2017, serta APBN-P Tahun Anggaran 2016.

“Rapat kerja yang dilaksanakan pada hari ini, merupakan bagian dari fungsi anggaran Komisi IV DPR RI di bidang pertanian. Berdasarkan data yang kami peroleh Kementerian Pertanian mengusulkan pagu alokasi tahun anggaran 2017 sebesar 25.9 Triliun,” papar Ketua Komisi IV Edhy Prabowo di DPR RI Senin (13/6).

Satu hal penting yang harus digaris bawahi, kata Edhy, Kementerian Pertanian agar mengurangi alokasi anggaran untuk program yang sulit dilaksanakan, kemudian diarahkan untuk program-program yang lebih produktif dan ekonomis, yang mengarah pada penguatan petani dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu agar

Komisi XI Desak Menkeu Konsisten Putuskan Besaran Asumsi Makro

Komisi XI DPR RI menggelar raker dan RDP dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN Kepala Bappenas, Setjen BPK, Kepala LKPP, Kepala BPKP, dan Kepala BPS, dengan agenda pembahasan tentang RKA-KL RAPBN-P 2016. Dalam rapat tersebut Komisi XI mendesak agar Menteri Keuangan memberikan kepastian tentang besaran angka asumsi makro yang akan dibahas.

Wakil Ketua Komisi Hafisz Tohir yang memimpin rapat tersebut menyampaikan bahwa anggota Komisi XI banyak memiliki pertanyaan terkait dengan hasil rapat Kementerian Keuangan dengan Badan Anggaran.

“Sesuai dengan Tupoksinya, bahwa kita telah memutuskan dalam rapat antara Komisi XI dengan pemerintah, tentang asumsi makro yang telah disepakati yakni sebesar 51 persen. Tetapi kita lihat di Banggar terjadi perubahan asumsi



Raker Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan beserta jajarannya

tersebut menjadi 52 persen,” ujar Hafisz di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis(9/6).

Menurutnya, apakah rapat kali ini akan meneruskan pembahasan RKA-KL ini sesuai dengan asumsi makro yang telah disepakati oleh pemerintah dengan Komisi XI, atau dengan asumsi yang telah disepakati dalam rapat Banggar.

“Untuk itu kami minta penjelasan kepada Menteri Keuangan, asumsi makro mana yang akan kita pegang sebagai asumsi dasar untuk membahas ini,” tutur Hafisz.

Komisi XI menganggap pihak Kement-

keu tidak konsisten dalam bertindak, sebab dengan terjadinya perbedaan besaran asumsi makro merupakan masalah yang penting untuk melanjutkan rapat selanjutnya.

Rapat sempat di skorsing selama 15 menit, untuk mendapatkan kesepakatan tentang besaran angka asumsi makro yang akan dibahas dalam rapat tersebut. Setelah masa skorsing dicabut, akhirnya diputuskan rapat akan membahas besaran angka asumsi makro berdasarkan hasil Raker pemerintah dengan Komisi XI, dimana asumsi pertumbuhan disepakati sebesar 51 persen. ■

(dep) Foto: Arief/hr



Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo

dalam pengalokasian anggaran bantuan alat dan mesin pertanian harus sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran,” ujar Edhy Prabowo.

“Komisi IV juga ingin men-

dengarkan penjelasan Menteri Pertanian terkait rencana RKA-KL dan RKP K/L tahun anggaran 2017, serta APBN-P 2016,” lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron menyampaikan beberapa saran, yang salah satu diantaranya adalah menyangkut masalah anggaran 2017 yang menurun drastis.

“Harus ada kebijakan politik anggaran yang tepat, karena saya yakin penurunan ini juga tidak terjadi diseluruh sektor. Kalau kita pernah mencapai puncak tertinggi penganggaran ditahun 2015 yakni sebesar 32 Trilyun, maka pada tahun ini kita dipotong menjadi 27 Trilyun,” ucap dia.

Dia juga menyatakan bahwa, harus ada upaya-upaya keras, karena tan-

tangan ke depan akan semakin keras dan kompetitif, dimana produktifitas itu adalah sebuah keniscayaan, karena pasti kebutuhannya semakin meningkat, tetapi lahannya justru semakin sempit.

Untuk bisa memperluas lahan dibutuhkan anggaran yang cukup besar. Kalau tantangan semakin besar tetapi perspektif anggarannya semakin turun, maka hal ini akan menjadi sebuah tantangan yang besar.

“Pangan sebagai hak asasi manusia, menurut saya keberadaannya akan terancam, dan hal ini akan mengancam pada sistem ketahanan pangan nasional. Jika dibandingkan dengan sektor lainnya, semestinya masalah pangan ditempatkan pada nomor urut satu,” tandasnya. ■

(dep) Foto: Naeifuroji/hr

Pansus DPR RI Usulkan Dibentuknya Badan Kekayaan Intelektual Indonesia

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Paten DPR RI John Kenedy Azis mengatakan sebagian fraksi dalam Pansus Paten merasa penting dibentuknya Badan Kekayaan Intelektual Indonesia guna menggantikan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.

Hal itu disampaikan ketika Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Nurul Barizah dan Bidang Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sony Maulana di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, (14/6).

“Beberapa fraksi DPR RI menganggap penting untuk membentuk Badan Kekayaan Intelektual Indonesia untuk menggantikan fungsi, tugas dan wewenang Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham dalam melakukan pemeriksaan, pendaftaran paten di Indonesia saat ini,” ujar John.

Politisi Golkar itu juga mengatakan tujuan dibentuknya lembaga tersebut agar perlindungan kekayaan intelektual dapat dilakukan secara independen, sehingga berada langsung dibawah Presiden. “Hal ini dimaksudkan agar pengembangan, pengelolaan dan perlindungan kekayaan intelektual dapat dilakukan dengan baik dan independen, karena nantinya Badan Kekayaan Intelektual Indonesia berada langsung dibawah Presiden, tidak lagi dibawah Kementerian Hukum dan HAM,” tegasnya.

Sebagian besar fraksi berpandangan independensi Badan Kekayaan Intelektual Indonesia sangat penting karena akan bertugas memeriksa paten dan membawahi Komisi Banding Paten. “Lembaga ini amat penting karena nantinya akan memeriksa dan memberikan paten serta membawahi Komisi Banding Paten yang memiliki kewenangan *quasi judicial* untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan banding terhadap penolakan permohonan paten atau permohonan koreksi atas deskripsi, klaim dan gambar setelah

permohonan diberi paten dan juga memeriksa keberatan pembatalan paten,” sambungnya.

John juga menegaskan salah satu alasan dibentuknya badan ini adalah karena invensi paten tidak hanya berasal dari satu bidang, tetapi berasal dari berbagai bidang ilmu, sehingga tidak tepat jika institusi yang melakukan pemeriksaan dan pendaftaran paten berada di bawah satu



Ketua Pansus RUU Paten DPR RI John Kenedy Azis

kementerian.

“Invensi paten tidak hanya berasal dari suatu bidang, melainkan juga berasal dari berbagai bidang ilmu seperti kesehatan, teknologi, transportasi dan lainnya, sehingga kurang tepat jika institusi yang melakukan pemeriksaan dan pendaftaran paten ada dibawah suatu kementerian yang mengurus suatu urusan tertentu,” jelasnya.

Meskipun begitu, John tetap menilai rencana tersebut akan menghadapi beberapa kendala, diantaranya mengenai *regulatory impact* atau dampak kebijakan pembentukan lembaga baru tersebut terkait masalah anggaran, sumber daya manusia, dana infrastruktur pengelolaan paten serta adanya moratorium pembentukan badan publik baru sebagaimana dalam hasil Rapat Kerja Kemenpan-RB dengan Komisi II DPR RI pada masa Presiden SBY tanggal

12 Juli 2011.

Selain itu, persoalan yang penting untuk dipikirkan adalah bagaimana agar lembaga ini nantinya benar-benar dapat menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dengan baik seperti bagaimana struktur organisasi badan tersebut.

“Permasalahan lain yang sangat penting adalah bagaimana agar Badan Kekayaan Intelektual Indonesia yang dibentuk benar-benar dapat menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya dengan baik. Bagaimana sebaiknya struktur organisasi badan tersebut, tugas, tanggung jawab dan

pengawasannya serta hal lainnya yg berkaitan,” sambung John.

Sebagaimana diketahui, Paten memiliki peran penting, selain untuk meningkatkan penerimaan negara juga untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa. Oleh karena itu, John berpandangan bahwa pendapatan negara bukan pajak yang berasal dari pendaftaran paten dapat digunakan untuk mengembangkan paten.

“Pendapatan negara bukan pajak yang berasal dari pendaftaran dan pemeliharaan paten nantinya agar digunakan untuk mengembangkan paten, diantaranya untuk mensosialisasikan paten kepada masyarakat dan memberikan insentif kepada inventor indonesia khususnya UMKM yang memiliki keterbatasan dana untuk mendaftarkan invensinya,” sambungnya. ■

(hs.mp) Foto: Arief/hr

Endang Gelar Pasar Murah dan Kunjungi Penderita Penyakit Kulit

Kepedulian sosialnya begitu terjaga pada masyarakat yang diwakilinya. Endang Srikarti Handayani menggelar pasar murah di bulan Ramadan sekaligus mengunjungi seorang anak penderita penyakit kulit di Boyolali, Jawa Tengah.



Anggota Komisi VI DPR RI Endang Srikarti Handayani

Anggota Komisi VI DPR RI ini, membagikan sembako murah seharga Rp 40 ribu yang terdiri dari 5 kg beras, 2 liter minyak goreng, dan 1 kg gula pasir. Pasar murah digelar tiga hari berturut-turut di tiga desa, yaitu Tawangari dan Ngringin di Boyolali, serta Purwosari di Solo. Pasar murah yang digelar bertepatan dengan Bulan Ramadan ini sangat strategis bagi masyarakat setempat yang sangat membutuhkan sembako murah di tengah melambungnya harga-harga sembako di pasaran.

Endang yang ditemui usai memberikan secara simbolis paket sembako kepada warga setempat, Jumat (10/6), menuturkan, sembako ini sengaja tidak diberikan secara gratis, justru untuk menjaga martabat warganya sendiri. Warga hanya diharuskan membeli di bawah harga pasar yang umumnya mencapai Rp80 ribu dengan paket 1 kg gula pasir, 5 kg beras, dan 2 liter minyak goreng.

“Masyarakat sangat antusias dengan

kegiatan seperti ini, apalagi ini bulan Ramadan. Di mana-mana harga sudah melambung tinggi. Paling tidak, bisa meringankan beban ekonomi rakyat kita,” terang Endang prihatin. Ada 6.000 paket sembako murah yang dibagikan hasil kerja sama Bulog, Jamkrindo, dan Dinas Perdagangan. Ada biskuit pula dari Kemenkes yang dibagikan kepada balita, ibu hamil, dan lansia untuk memenuhi kebutuhan gizi selama Ramadan.

Usai menggelar pasar murah, politisi Partai Golkar itu menyempatkan diri mengunjungi keluarga miskin di Kelurahan Siswodipuran, Boyolali. Ada balita bernama Putri Raya (1,5 tahun) yang menderita penyakit kronis dan berbahaya. Kulit Putri selalu mengelupas, pecah-pecah, dan teksturnya keras bersisik. Menurut keterangan ibundanya Puji Handayani, kelainan kulit yang diderita buah hatinya sudah dialami sejak lahir.

Akibat kelainan pada kulitnya itu, Putri selalu merasa kepanasan. Ibundanya mengipasi Putri hampir sepanjang hari.

Ironisnya, ia justru tak berkeringat. Saat udara panas menyengat, justru Putri merasakan gatal-gatal di sekujur tubuhnya. Sebelumnya, Putri pernah dirawat di Rumah Sakit Moewardi, Solo selama sebulan.

Tak ada perbaikan fisik yang berarti walau sudah dirawat di RS. Dokter yang merawatnya belum menemukan diagnosis atas penyakit yang diderita bocah kecil itu. Kedua orangtua Putri sudah merasa lelah harus pulang pergi ke RS tanpa ada perubahan atas kesembuhan fisik Putri. Kini, kedua orangtua Putri sudah menghentikan berobat jalan ke RS. Putri sehari-hari hanya diberi obat herbal.

Endang pun bersimpati atas perjuangan Puji dan Sutarmo orangtua Putri yang tinggal di dapilnya sendiri. Ia menyerukan agar Pemda setempat dan para dermawan mau membantu meringankan beban keluarga miskin ini demi kesembuhan Putri dari derita penyakit yang belum diketahui obatnya itu. ■

DPR RI Soroti Kartel Daging Sapi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi menilai sudah saatnya Indonesia memberlakukan impor jenis sapi bakalan untuk menghindari praktik kartel perdagangan yang membuat harga daging melambung tinggi.



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi bersama Anggota Komisi IX Muhammad Iqbal dan Wakil Ketua MPR RI dalam Dialektika Demokrasi

Hal itu disampaikan saat menjadi pembicara dalam dialektika demokrasi dengan tema “Presiden Jokowi dan Kartel Daging Sapi” di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta pada Kamis (9/6). Selain Viva, hadir pula Anggota Komisi IX Muhammad Iqbal dan Wakil Ketua MPR RI Osman Sapta Odang sebagai pembicara.

Menurut Viva, kebijakan impor sapi jenis bakalan lebih efisien dibandingkan pemerintah harus mengimpor daging sapi beku untuk menutupi kebutuhan masyarakat yang tinggi saat bulan Ramadhan. “Sudah saatnya pemerintah mengimpor sapi bakalan untuk ditanak sebagai pengganti daging impor beku,” ujar Viva.

“Saat ini belum ada impor sapi bakalan. Tidak ada tanda-tanda peternakan sapi di daerah Jawa melainkan adanya kapal ternak untuk mengambil sapi-sapi dari NTT,” sambung politisi PAN tersebut.

Selain itu Anggota Komisi IX DPR RI Muhammad Iqbal menilai pemerintah lamban dalam mengantisipasi stok daging sapi agar tidak memperngaruhi harga menjelang lebaran. “Seharusnya impor dilakukan awal bulan, tetapi karena ini telat maka yang terjadi adalah kenaikan harga daging,” ucap Politisi PPP tersebut.

Sebagaimana diketahui, konsumsi daging nasional sebesar 600 ribu ton daging

atau sekitar 3,9 juta ekor, sedangkan stok daging nasional sekitar 350 ribu ton. Maka mengalami kekurangan sekitar 250 ribu ton.

Oleh karena itu Iqbal mengingatkan agar pemerintah mampu menghitung secara benar berapa stok dan kebutuhan nasional agar bisa disesuaikan. “Ada beberapa hal dalam jangka panjang, saya kira penggemukkan dan produksi sapi harus ditingkatkan. Kalau kita ingin tahun depan

tak ingin kenaikan kembali terulang maka pemerintah harus menghitung benar berapa stok dan kebutuhan nasional,” katanya.

Selain itu, Iqbal juga mengingatkan agar pemerintah memperhatikan kesehatan dan kualitas daging sapi impor tersebut. “Satu sisi pemerintah ingin harga stabil, tapi di satu sisi lain sapi-sapi itu disuntik oleh hormon, hingga pengaruhi kesehatan kita. Pemerintah harus antisipasi bagaimana kualitas dan kesehatan daging terjaga,” papar Iqbal.

Selain itu, Wakil Ketua MPR RI Osman Sapta Odang menilai pelaku kartel daging adalah biadab karena telah mempermainkan harga daging yang dari tahun ke tahun terus naik. “Perbuatan mereka yang melakukan kartel daging itu biadab dan jangan dibiarkan,” tegas Osman.

Menurut Osman, harga daging dari tahun ke tahun yang terus naik adalah permainan sejumlah perusahaan yang melakukan kartel. Karena itu, dia meminta pers untuk berani membongkar permainan kartel daging tersebut. “Pers harus berani menulis dan terus mengkritik soal daging ini,” pungkas Osman. ■

(hs) Foto: Andri/br

BKSAP Adakan Buka Puasa Bersama



Suasana acara buka puasa bersama BKSAP

Komisi VI Pertanyakan Realisasi Anggaran dan Kendala di Kemenperin

Komisi VI DPR RI menyelenggarakan rapat kerja dengan Menteri Perindustrian RI, membahas tentang realisasi penyerapan anggaran dan pemotongan anggaran pada tahun 2016. Selain itu Ketua Komisi VI Teguh Juwarno yang memimpin sidang juga mempertanyakan kendala yang dihadapi setelah adanya penghematan anggaran.

“Mohon diberikan penjelasan mengenai realisasi penyerapan anggaran Kementerian Perindustrian sampai dengan Mei 2016,” ujar Teguh, di ruang sidang Komisi VI, Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis sore (9/6).

Menteri Perindustrian Saleh Husin menjelaskan, realisasi anggaran di Kemenperin sampai dengan 31 Mei 2016 sebesar Rp 586,489 miliar atau 17,87 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 3,282 triliun. Menurutnya realisasi ini meningkat 7 persen apabila dibandingkan

dengan capaian pada 2015.

“Sedangkan apabila dibandingkan dengan target sampai dengan 31 Mei 2016 sebesar 27,59 persen maka realisasi anggaran Kementerian Perindustrian masih di bawah target yang ditetapkan,” ungkap Saleh menjawab pertanyaan Ketua Komisi VI.

Dewan dari dapil Jawa Tengah IX ini melanjutkan dengan pertanyaan yang berkaitan dengan kebijakan presiden, Inpres No 4 tahun 2016 tentang langkah-langkah penghematan belanja kementerian. “Berapa besarnya dan dari kegiatan apa saja yang akan diambil untuk penghematan,” tanya Teguh.

Menanggapi pertanyaan itu, Saleh menjawab, besar penghematan belanja Kemenperin sebesar Rp. 369.500.697.500,- Dia mengungkapkan penghematan diambil dari perjalanan dinas dan paket meeting, honorarium kegiatan, pembangunan gedung, serta anggaran dari kegiatan yang belum terikat kontrak.

Berkaitan dengan kendala yang ditanyakan Ketua Komisi VI, Saleh memaparkan, kementeriannya harus



Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno

melakukan proses revisi DIPA. Sehingga solusi mengatasi hal tersebut dengan mempercepat proses revisi penyesuaian kegiatan pada masing-masing unit kerja eselon I.

“Dan penyesuaian target yang segera disampaikan ke Bappenas dan Kementerian Keuangan,” kata Saleh. ■

(eko) Foto: Jaka.br

Momentum Ramadan sering dimanfaatkan untuk memperlancar jalinan tali silaturahmi. Silaturahmi yang berasal dari dua kata, “silah” dan “rahmi”. Silah artinya menyambungkan. Sedangkan rahmi artinya rasa kasih sayang dan pengertian. Buka puasa bersama acap kali dijadikan media untuk menyambung tali kasih antar kerabat.

Kegiatan inilah yang dimanfaatkan oleh Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP). Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf, mengatakan buka puasa bersama ini sebagai silaturahmi agar memudahkan dalam menjalankan fungsi-fungsi legislatif khususnya di BKSAP.

“Dalam silaturahmi ini kita bisa melakukan komunikasi. Tidak ada kesulitan ketika kita menjalankan silaturahmi. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan ketika kita menjalin tali silaturahmi. Makanya silaturahmi itu penting,” ungkap Nurhayati, di Ruang Rapat BKSAP, Gedung DPR RI, Jakarta, saat memberi

sambutan sebelum takjil dimulai, Kamis sore (9/6).

Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini mengatakan, di hari keempat Bulan Ramadhan, silaturahmi para jajaran BKSAP ini sebagai kebersamaan kelembagaan untuk kerja yang lebih produktif. “Kekuatan dalam menjalankan amanah yang kita,” ujar Nurhayati.

Dalam acara ini hadir, Pimpinan dan Anggota BKSAP DPR RI. Sekretariat, Kepala Biro, dan Kepala Bagian, Kasubag dan seluruh staf, serta tenaga ahli BKSAP di lingkungan Setjen DPR RI. “Terima kasih pada sekretariat yang telah mendukung kegiatan ini. mudah-mudahan kita bisa selalu akrab,” tutup Nurhayati. ■

(eko) Foto: Naefuroji/od

Komisi VIII Evaluasi Kinerja Kemen PP-PA tahun 2016

Komisi VIII DPR RI melakukan evaluasi terhadap kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), untuk meningkatkan serapan anggaran Tahun 2016, sehingga dalam melaksanakan tugasnya dapat lebih optimal.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis menuturkan bahwa Komisi mendapat penjelasan Kementerian PPPA tentang pelaksanaan APBN Tahun 2016 sampai dengan Mei 2016 baru sebesar Rp.39,493 atau sebesar 5,3 persen dari pagu anggaran sebesar Rp.769,331 Milyar.

“Komisi VIII mendesak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk meningkatkan serapan anggaran Tahun 2016,” papar Iskan Qolba Lubis, pada Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri PPPA Yohana S. Yembise, membahas pelaksanaan APBN Tahun 2016 dan pembicaraan

Pendahuluan RAPBN Tahun 2017, serta Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Semester II BPK RI tahun 2015.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mendesak Menteri PPPA segera memberikan data terbaru terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan memberikan laporan tentang langkah-langkah konkret terkait strategi nasional penghapusan kekerasan terhadap anak 2016-2020.

Menteri PPPA juga diminta untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat Media, Tokoh Agama, dan tokoh masyarakat serta berbagai *stakeholder* lainnya dalam upaya implementasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selanjutnya menyusun program prioritas sesuai dengan isu terkini berdasarkan indikator yang terukur dari tiga program unggulan dan fokus terha-

dap program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Komisi VIII juga mengusulkan pengembangan model pengasuhan anak berbasis komunitas pada anak-anak keluarga TKI dan TKW, serta penyelenggaraan sosialisasi dan advokasi bagi calon Kepala daerah dan anggota DPR RI untuk mendorong penyusunan kebijakan daerah tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Terkait dengan anggaran Tahun 2017, Komisi VIII memahami penjelasan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dan Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2017.

“Pagu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp573.120.662.000,- (Lima ratus tujuh puluh tiga miliar seratus dua puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah),” paparnya. ■



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis

(as), Foto: Kresna/br

Legislator Ingatkan Pemerintah Soal Pemangkasan APBN-P 2016



Sejumlah Anggota DPR RI bersama Menteri Agraria di ruang tunggu komisi II

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy mengingatkan pemerintah terkait rencana untuk memangkas anggaran belanja sejumlah kementerian/ lembaga dalam APBN Perubahan 2016.

Komisi III Pertanyakan Minimnya Usulan Anggaran Kejaksaan

Anggota Komisi III DPR RI, Hasrul Azwar Harahap mempertanyakan minimnya anggaran yang diusulkan Kejaksaan Agung. Padahal Kejaksaan Agung tengah membuka beberapa kantor kejaksaan negeri baru di beberapa daerah.

Hal tersebut diungkapkannya dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung, HM. Prasetyo di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (13/6).

“Anggaran Kejaksaan Agung tidak pernah lepas dari angka 4 triliun bahkan mendapat penghematan dan pengurangan anggaran sebanyak sepuluh persen. Padahal saat ini kejaksaan tengah membuka kantor baru di beberapa daerah yang tentunya semakin banyak kebutuhannya. Tidak hanya itu tuntutan profesionalitas juga terus diharapkan dari kejaksaan. Ini ada apa? Apa karena Kejaksaan Agung tidak ada inovasi baru, suksesi baru dengan program-program baru untuk memajukan lembaga, atau terjebak dalam rutinitas lainnya,” tanya Hasrul.

Politisi dari Fraksi PPP ini memban-



Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Albabsyi

dingkan dengan mitra kerja Komisi III lainnya yang rata-rata meminta kenaikan

yang cukup signifikan. Polri misalnya, yang meminta kenaikan anggaran sebanyak delapan triliun.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi III lainnya. Aboe Bakar Albabsyi menilai minimnya anggaran yang diajukan oleh Kejaksaan Agung terlebih lagi mendapat potongan anggaran sebesar sepuluh persen menjadi salah satu indikator akan minimnya keberpihakan negara terhadap bidang hukum. Bahkan ketika beberapa Kementerian/ Lembaga mendapat tambahan anggaran dengan alasan kebutuhan mendesak, namun kejaksaan Agung tidak mendapat hal yang sama.

“Angka 4 triliun lebih sedikit dalam psikologis kejaksaan Agung memang kurang menarik, tapi melihat kondisi negara yang sedang menurun pendapatannya, mungkin hal tersebut dapat dimaklumi. Namun dibalik itu, hal itu seperti memperlihatkan minimnya keberpihakan negara terhadap bidang hukum. Saya khawatir minimnya anggaran ini akan berpengaruh terhadap kinerjanya,”ujarnya.

Meski demikian baik Hasrul maupun Abubakar Albabsyi mengaku akan tetap memperjuangkan apa yang diusulkan mitra kerjanya itu kepada Badan Anggaran DPR RI dan Pemerintah. ■

(Ayu). Foto: Andri/hr

Ia menilai rencana tersebut adalah hal yang aneh karena biasanya APBN-P digunakan untuk menambah anggaran.

“APBN-P 2016 ini adalah APBN-P paling aneh. Karena biasanya APBN-P itu digunakan untuk menambah anggaran,” ujarinya. Hal itu disampaikan di Gedung DPR RI, Jakarta pada Kamis (9/6).

Politisi PKB ini juga memahami kebijakan pemangkasan ini karena penerimaan pemerintah dari sektor pajak masih kurang. Di lain sisi, pemerintah tengah berupaya meningkatkan pembangunan di berbagai sektor sehingga memiliki dampak pada prioritas anggaran di sejumlah bidang.

Namun, ia juga mengkhawatirkan pemangkasan anggaran ini akan mengganggu kinerja pemerintahan, terutama terkait percepatan pembangunan.

Apalagi pemotongan itu dilakukan terhadap lembaga pemerintah yang terkait birokrasi.

“Dari sekian banyak mitra di Komisi II, khusus mitra aparat sipil negara dan birokrasi kemungkinan akan diputuskan untuk tidak dipotong dalam APBN-P 2016. Mitra itu seperti Kementerian Agraria, Kemendagri, Setneg,” ujar Lukman.

Ia juga menegaskan bahwa untuk sektor birokrasi sebaiknya dikaji ulang untuk dilakukan pemotongan karena itu akan berhubungan langsung terhadap proses berjalannya program pemerintah.

“Sebenarnya setuju saja untuk efisiensi. Tapi untuk sektor tertentu seperti birokrasi itu sudah anggaran kecil dipotong, itu ganggu kinerja. Untuk tunjang pekerjaan baik, aparat sipil negara ini harus baik juga,” ungkap Lukman.

Ia juga menyadari bahwa pemerintah saat ini tengah gencar melaksanakan pembinaan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan para PNS. Oleh karenanya jika anggaran pelatihan mengalami pemotongan maka akan berdampak pada proses berjalannya program pemerintah.

Salah satu resiko jika adanya pemotongan anggaran bagi pelatihan PNS adalah pelayanan kepada masyarakat yang kurang maksimal. “PNS harus di-upgrade. Kalau enggak ada anggaran pelatihan, kami jadi pesimistis pelayanan ini akan maksimal,” ujarinya.

Legislator dapil Riau II ini juga menegaskan bahwa Komisi II sedang berupaya untuk mempertahankan jumlah anggaran di kementerian yang menjadi mitra kerjanya agar tak berkurang dalam APBN-P 2016 yang akan disahkan nantinya. ■

(hs), Foto: Rumi/hr

Pariwisata Berpotensi Sumbang Tambahan Devisa

Pemerintah, melalui Kementerian Pariwisata memperkirakan pada tahun 2020, sektor pariwisata akan menempati urutan tertinggi penyumbang devisa negara dan penghasil lapangan kerja. Bahkan, sektor ini digadang-gadang akan melampaui sumbangan devisa dari sektor migas atau batubara.

“Dalam data pendapatan devisa selama tiga tahun terakhir, bahwa hampir seluruh sektor usaha itu mengalami penurunan dalam menyumbang devisa negara. Tetapi khusus sektor pariwisata, itu justru memperlihatkan sebuah peningkatan yang signifikan,” Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya, di sela-sela rapat kerja antara Komisi X DPR RI dengan Menteri Pariwisata, Arief Yahya, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/6). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah (F-PG).

Melihat potensi pariwisata Indonesia

yang sangat menjanjikan, Riefky menghimbau kepada Kepala Daerah, terutama Gubernur, Bupati dan Walikota, dalam mengambil kebijakan politik anggaran daerah untuk lebih mempertimbangkan tentang pengembangan potensi pariwisata.

“Kalau memang kebijakan politik anggaran di daerah bisa berpihak pada sektor pariwisata, seperti yang saat ini kita lakukan di pusat, itu tidak menutup kemungkinan, atau mempunyai peluang yang sangat besar, sektor pariwisata akan menambah pendapatan asli daerah dan akan membuka lapangan kerja yang signifikan,” tambah Riefky.

Politisi F-PD itu menambahkan, tren di Pemerintah Pusat saat ini tidak lagi pada eksploitasi batubara atau minyak bumi, tetapi lebih mengoptimalkan dan memberdayakan dari potensi pariwisata. Pariwisata yang bisa dikembangkan diantaranya pariwisata alam,

wisata sejarah, dan religi.

“Kalau kita ingin mengundang anggaran swasta atau investor ke sektor pariwisata, tentunya mereka ingin melihat pengembangan awal. Pengembangan awal ini yang kita himbau kepada Kepala Daerah untuk mengalokasikan anggaran ke sektor pariwisata. Karena kita yakin bahwa pengembangan pariwisata selain dapat memberikan tambahan pendapatan asli daerah, juga dapat membuka lapangan pekerjaan,” yakin Riefky.

Politisi asal dapil Aceh ini menilai, selama ini Pemerintah Daerah menempatkan alokasi anggaran pariwisata di urutan terbawah. Hal ini dinilai tidak sesuai dengan tren nasional.

“Kalau daerah ingin cepat membuka lapangan pekerjaan baru, dan cepat meningkatkan pendapatan asli daerah, trennya pengembangan pariwisata,” saran Riefky.

Menpar menargetkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional setidaknya 13 persen pada tahun 2017, dan minimal 15 persen pada tahun 2019. Tahun mendatang, ditargetkan sektor pariwisata menghasilkan devisa sebesar Rp 200 triliun, dan 280 triliun pada tahun 2019. ■



Ketua Komisi X DPR RI
Teuku Riefky Harsya

(sf), Foto: Azka/hr

Legislator Pertanyakan Posisi Kemendagri Kelola Perbatasan

“Sebenarnya tugas Kemendagri disana sebagai apa? Kalau hanya mengkoordinasikan antar kementerian dan lembaga saja, itu bukan kerja Kemendagri,” ujar Misbakhun.

Politisi Golkar itu menjelaskan kepada Kemendagri bahwa untuk melakukan tugas koordinasi mengenai wilayah perbatasan harus dilakukan oleh banyak pihak seperti TNI, Kementerian Luar Negeri dan Imigrasi.

Hal serupa juga terkait sengketa wilayah perbatasan, bagi Misbakhun hal itu bukan kewenangan Kemendagri untuk menyelesaikannya. “Bukan haknya Kemendagri untuk menyelesaikan sengketa perbatasan. Forum dialogis itu milik Kementerian Luar Negeri, bukan

Kemendagri,” tambahnya.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dibentuk oleh Kemendagri juga menjadi sorotan karena kinerjanya belum terlihat “Sebenarnya ada atau tidak ini barang? Bagaimana bisa kalau ada kejadian di luar negeri terkait perbatasan, Kemendagri bisa masuk ke situ?” katanya.

Meskipun begitu, Misbakhun mengapresiasi upaya Kemendagri untuk melakukan rasionalisasi anggaran dalam hal perjalanan dinas. “Saya mengapresiasi upaya Kemendagri untuk melakukan rasionalisasi secara drastis karena realisasinya banyak sekali yang menyangkut perjalanan dinas. Ini menunjukkan efisiensi di Kemendagri yang sangat tinggi,” pungkasnya. ■

(hs.mp), Foto: Rumi/hr



Anggota Komisi II DPR RI Misbakhun

Anggota Komisi II DPR RI Misbakhun mempertanyakan posisi Kemendagri dalam keterlibatannya mengelola perbatasan. Hal itu disampaikan saat Komisi II DPR RI melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, (13/6).

Pansus DPR RI Tekankan 3 Spirit dalam RUU Pemberantasan Terorisme

Panitia Khusus (Pansus) DPR RI RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dipimpin Wakil Ketua Pansus Hanafi Rais menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan beberapa lembaga terkait, yang diantaranya adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Gedung DPR RI, Senayan, Kamis (8/6).

Ketua Pansus Muhammad Syaffi mengutarakan bahwa terdapat tiga spirit yang akan ditekankan dalam membahas aturan penanganan dan pencegahan tindak pidana terorisme. Tiga spirit itu adalah penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan pemberantasan terorisme.

“Tiga spirit tersebut bertujuan agar penindakan aksi terorisme tidak berbenturan dengan aspek lainnya. Jangan pemberantasan terorisme itu melanggar hukum dan tidak melindungi HAM. Jangan pula karena melindungi HAM, teroris tidak diberantas,” jelas politisi Gerindra itu.

Sementara itu, untuk menanggulangi aksi tindak pidana terorisme, Wakil Ketua Pansus lainnya Supiadin Aries Saputra (F-Nasdem) menekankan perlunya keterlibatan masyarakat dalam penanganan

aksi teror. “Masyarakat harus dilibatkan, bagaimana kita membangun early warning system ditengah-tengah masyarakat,” jelasnya.

Hal yang menjadi perhatian, lanjut Supiadin, bahwasanya pelaku terorisme sebelum melaksanakan aksinya akan melakukan survei sasaran terlebih dahulu, sehingga diperlukan kepekaan masyarakat untuk mendeteksi aksi terorisme secara lebih dini.

“Untuk melaksanakan aksinya, pelaku tidak hanya survei sasaran, mereka memerlukan waktu relatif lama untuk survei. Mereka juga membutuhkan tempat tinggal untuk merakit bom dan selalu kita temukan di tengah pemukiman warga,” papar Supiadin.

Disamping itu, terkait dengan beberapa temuan Komnas HAM, Roichatul Aswidah merekomendasikan penghapu-

san Pasal 43a UU Terorisme, berbunyi “Dalam rangka penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, penyidik atau penuntut umum dapat melakukan pencegahan terhadap setiap orang tertentu yang diduga akan melakukan Tindak Pidana Terorisme untuk dibawa atau ditempatkan pada tempat tertentu yang menjadi wilayah hukum penyidik atau penuntut umum dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.”

Menurutnya, banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam penindakan terorisme, yakni kesalahan penangkapan, penahanan hingga penyiksaan. “Sama seperti orang ditangkap dan di tahan tetapi tidak memenuhi prosedur hukum. Mereka harus tahu kenapa mereka ditangkap dan semua hak-haknya yang mengikuti tetap harus dilindungi,” ujar Roichatul. ■

(ann), Foto: Arief/br



Pimpinan Pansus RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme



BERITA BERGAMBAR



Ketua DPR RI Ade Komarudin didampingi Wakil Ketua Agus Hermanto dan sejumlah Anggota DPR RI meninjau kesiapan PT KAI menjelang lebaran di Stasiun Gambir dan Senen, Jakarta Rabu (15/6), Foto: Kresno/hr



Raker Komisi III DPR RI dengan KPK dipimpin Bambang Soesatyo bahas kasus pembelian RS. Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Rabu (15/6), Foto: Runi/hr



Raker Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN yang diwakili Menkeu dipimpin Teguh Juwarno terkait realisasi anggaran dan pemotongan anggaran tahun 2016. Kamis (16/6), Foto: Jaka/hr



Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 0811 9443 344



@dpr_ri



DPR RI



@DPR_RI



DPR RI